

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Modal Sosial

1. Pengertian Modal Sosial

Modal sosial (*Sosial Capital*) memiliki pengertian berbeda bagi setiap orang. Perbedaan dan perdebatan tersebut tidak hanya terjadi diantara ahli sosiologi namun juga terjadi di ahli antropologi, politik dan ekonomi. Pada awalnya, konsep modal sosial berasal dari ranah ilmu sosiologi dan politik yang ditujukan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat yang berada dalam suatu komunitas tertentu saling bekerja sama untuk menyelesaikan dilema dari aktivitas bersama. Definisi yang dikeluarkan *World Bank* mengenai modal sosial adalah kelembagaan, hubungan dan norma yang membentuk kualitas dan kuantitas dari interaksi sosial masyarakat. Interaksi sosial akan membangun keterpaduan sosial (*Sosial cohesion*) yang berperan penting dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Modal sosial bukan hanya menekankan pada jumlah institusi yang ada dalam masyarakat tetapi lebih pada perekat yang mengikat masyarakat secara bersama-sama.¹

Putnam mengartikan modal sosial sebagai “*features of sosial organization such as networks, norms, and sosial trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit.*” Modal sosial menjadi

¹ Nyoman Utari Vipriyanti, *Modal Sosial & Pembangunan Wilayah: mengkaji Succes Story Pembangunan di Bali*, (Malang: UB Press, 2011), 31

pelekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan, dan jaringan kerja sehingga terjadi kerja sama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama.

Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dengan saling percaya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok atau organisasi, yang sangat bergantung pada kesetaraan norma dan nilai, dimulai dari mekanisme pertukaran informasi timbal balik yang difasilitasi oleh tindakan bersama dan kemungkinan mengesampingkan kepentingan individu di atas kepentingan kelompok. Pola modal sosial menurut Collier berpangku pada mekanisme saling tukar informasi yang difasilitasi dengan tindakan secara bersama-sama. Collier juga menggambarkan norma yang berlaku di masyarakat bisa menjadi suatu kekuatan atau sebaliknya menjadi suatu hambatan atau gangguan dipihak lain.

Fukuyama menyatakan bahwa Kegagalan pembangunan ekonomi yang terjadi, faktor utamanya adalah tidak berfungsinya komponen-komponen modal sosial yang idealnya tumbuh dalam masyarakat. Francis Fukuyama menyatakan bahwa dengan modal sosial yang kuat, masyarakat memadukan kekuatan dan energi untuk menghadapi kemiskinan. Peningkatan modal sosial seharusnya menjadi tujuan utama pengentasan kemiskinan.

Menurut Putnam, Fukuyama perbedaan antar rasa saling percaya menjadi faktor penyebab perbedaan pembangunan daerah. Selain itu, kepercayaan juga merupakan bagian dari modal sosial yang dapat

meningkatkan peluang masyarakat memperoleh sumber kesejahteraan.² Modal sosial didefinisikan secara berbeda oleh para ekonom, sosiolog, dan pakar kebijakan. Pengelompokan sumber modal sosial disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam mengukur modal sosial dan secara garis besar dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan kerja.³

Menurut Pierre Bourdieu, Modal Sosial dapat diartikan sebagai seperangkat sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial dalam suatu kelompok atau individu karena mempunyai jaringan hubungan jangka panjang yang berupa jaringan kelembagaan yang dilandasi oleh saling pengetahuan dan saling pengakuan.⁴ Ia juga menganalogikan tentang modal sosial sebagai medan pertempuran pertukaran modal simbolik antara aktor-aktor yang memiliki modal budaya yang mampu mengendalikan individu, komunitas, dan bahkan massa. Berbeda dengan Bourdieu, Coleman justru melihat kekuatan modal sosial dari sudut pandang optimis. Menurut Coleman, modal sosial adalah kekuatan yang dapat diakses dan digunakan bahkan oleh orang-orang dengan modal lemah atau posisi lemah. Coleman dalam tulisannya tentang *Social Capital in the Creation of Human Capital* (1988) memperkenalkan modal sosial sebagai cara konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial, menggabungkan komponen perspektif sosiologis dan ekonomi.³⁷ kemudian ia juga menyampaikan tentang pengertian modal sosial ditentukan oleh fungsinya.³⁸ Modal sosial

² Neng Kamarni, *Modal Sosial Islami (Menuju Kesejahteraan Berbasis Maqashid Syariah)*, (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019),7-8

³ Nyoman Utari Vipriyanti, *Modal Sosial & Pembangunan Wilayah...*,13.

⁴ John Field, *Modal Sosial*, terjemah (Bantul: kreasi wacana,2016), 23

mempunyai banyak fungsi, namun menurutnya semuanya pada dasarnya mempunyai dua unsur yang sama, yaitu struktur sosial dan organisasi sosial.³⁹

2. Unsur-unsur Modal Sosial

Modal sosial merupakan sumber daya individu dalam suatu kelompok. Artinya modal sosial muncul dari individu dan mempengaruhi kelompok. Seorang sosiolog yang bekerja di Kennedy School of Government di Harvard University, AS, mengatakan tentang konsep Putnam bahwa modal sosial mencakup jaringan sosial, kepercayaan, nilai-nilai dan norma. Selain itu, kata Putnam, modal sosial dapat membangun jembatan antar kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat pemahaman bersama akan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Tiga elemen utama modal sosial yang harus dikaji peneliti adalah jaringan, kepercayaan, dan norma.;

a. Jaringan (*Network*)

Jejaring sosial merupakan hubungan yang terjalin antara beberapa orang dalam suatu kelompok atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan yang dihasilkan bisa bersifat formal atau informal. Hubungan sosial merupakan gambaran atau cerminan kerja sama dan koordinasi antar warga negara berdasarkan ikatan sosial yang aktif dan timbal balik.⁵

⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 157

Sebagaimana disampaikan oleh Fatoni dari Lawang,⁶ menyampaikan bahwa "*Network*" merupakan terjemahan dari jaringan, yang terdiri dari kata kunci *net* dan *work*. Kata jaringan mempunyai arti jaringan yaitu hubungan simpul-simpul yang saling berhubungan. Namun, bekerja berarti bekerja. Jika terhubung, jaringan berarti model kerja berjaringan atau kerja berjaringan. Jejaring sosial diartikan sebagai rangkaian hubungan sosial yang menghubungkan seseorang dengan orang lain secara langsung dan dengan orang lain secara tidak langsung.

Adanya jaringan sosial, menurut Putnam, memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya.⁷ Jejaring sosial inilah yang kemudian menjadi modal sosial. Oleh karena itu, unsur modal sosial berbentuk jaringan dalam penelitian ini sebenarnya adalah hubungan yang tercipta antara banyak individu dalam suatu kelompok atau antara suatu kelompok dengan kelompok lain yang bersifat aktif dan timbal balik. Hubungan yang dihasilkan bisa bersifat formal atau informal.

Jaringan yang kuat tergantung pada kemampuan individu untuk berjejaring dalam suatu kelompok atau komunitas. Salah satu kunci keberhasilan dalam membangun modal sosial adalah kemampuan suatu perkumpulan atau sekelompok orang dalam suatu perkumpulan untuk berpartisipasi dalam suatu jaringan hubungan sosial. Sehingga masyarakat senantiasa terhubung dengan masyarakat lainnya melalui berbagai varian hubungan yang saling berhubungan, yang dilaksanakan

⁶ Muhammad Sulton Fatoni, *Kapital Sosial Pesantren Studi Tentang Komunitas Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur*, (Jakarta : UI – Pers, 2015). 30

⁷ Rusydi Syahra, Modal Sosial :Konsep dan Aplikasi, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, (2003), 6

berdasarkan prinsip kesukarelaan, kesetaraan, dan kebebasan.

b. Kepercayaan (*Trust*)

Moorman mendefinisikan kepercayaan sebagai keinginan untuk bergantung pada mitra yang dapat diandalkan. Saat mengambil keputusan, dia mengambil keputusan berdasarkan pilihan orang yang dia percaya. Tidak ada keputusan ragu-ragu (*Belief*).⁸ Fukuyama menyebut kepercayaan sebagai elemen kunci modal sosial. Menurutnya, modal sosial merupakan keterampilan yang dihasilkan dari kepercayaan yang terus menerus terhadap masyarakat atau bagian tertentu dari masyarakat.⁹ Dengan menjaga kepercayaan, orang dapat bekerja sama secara efektif. Kepercayaan merupakan bagian penting dari modal sosial yang menjadi perekat keberlangsungan hubungan interpersonal dalam kelompok masyarakat.¹⁰

Konsep kepercayaan yang disebutkan oleh Moorman berbeda dengan yang dijelaskan oleh Fukuyama. Moorman berfokus pada individu, keyakinan individu. Kepercayaan ini memungkinkan tingkat kepercayaan kelompok berbeda-beda pada setiap orang. Fukuyama sekaligus menjelaskan tentang kepercayaan yang timbul dalam masyarakat, yaitu kepercayaan yang disepakati dan tingkat kepercayaan itu seragam. Keyakinan inilah yang dijelaskan oleh Fukuyama yang konsisten dengan konsep modal sosial Putnam. Menurut Putnam, kepercayaan berdampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini

⁸ Moorman, Christin, Gerald Zaltman and Rohit Deshpande, Factors Affecting Trust in Market Research Relationship, *Journal Marketing Research*, Vol 57, January, 1993, 81- 101

⁹ John Field, *Modal Sosial...*, 102

¹⁰ Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, (Yogyakarta: PenerbitQalam, 2002), 37

dibuktikan dengan keterhubungan antar masyarakat yang mempercayai jejaring sosial semakin menguatkan norma-norma tentang perlunya saling membantu.¹¹

c. Norma

Norma adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial yang mengandung sanksi, cara moral maupun fisik apabila sekelompok orang lakukan Pelanggaran atas nilai-nilai sosial. Norma merupakan acuan perilaku yang memungkinkan seseorang menentukan apakah orang lain menghargai tindakannya, yang juga menjadi ciri orang lain menolak atau mendukung perilakunya.¹² Modal sosial menguat ketika terdapat norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma-norma perilaku yang diciptakan dan dipelihara dalam masyarakat. Standar harus ditegakkan dengan sanksi yang jelas dan efektif. Tanpa norma-norma yang disepakati dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, maka timbullah keadaan anomie, dimana setiap orang berusaha bertindak sesuai keinginannya sendiri, tanpa merasa terhubung dengan orang lain. Mekanisme penetapan sanksi juga tidak ada karena tidak ada standar yang disepakati bersama mengenai sanksi tersebut. Menurut Coleman, norma diprakarsai dan dipertahankan oleh segelintir orang yang melihat manfaat dari mengikuti norma dan kerugian jika melanggarnya.¹³

Aturan standar tersebut biasanya tidak tertulis, tetapi setiap anggota masyarakat memahaminya dan menentukan pola perilaku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Konfigurasi norma yang

¹¹ Rusydi Syahra, *Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi...*, 6

¹² Fatoni, *Kapital Sosial Pesantren...*, 29

¹³ George Ritzer, dan Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Pustaka Kencana, 2006, 764

berkembang dalam masyarakat menentukan apakah norma tersebut memperlambat kedekatan hubungan antar individu dan berdampak positif terhadap perkembangan masyarakat. Dalam hal ini norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam mengendalikan perilaku yang tumbuh di masyarakat. Sebab dengan adanya norma juga berdampak pada sanksi sosial yang melarang seseorang melakukan sesuatu yang menyimpang dari adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

B. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal

1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal

Pembangunan ekonomi lokal, selanjutnya PEL, merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam kajian dinamika perekonomian daerah di tingkat lokal. Pendekatan ini merupakan alternatif atas kegagalan strategi pembangunan yang bersifat spesifik dan sektoral dan *topdown*. Pada dasarnya, PEL mengacu pada strategi pembangunan berbasis wilayah, dimiliki dan dipimpin oleh masyarakat setempat dengan tujuan utama meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ada juga yang menyebut PEL sebagai sebuah proses yang mempertemukan berbagai aktor lokal untuk berkolaborasi dan menggunakan sumber daya lokal guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Dunia memandang PEL sebagai sebuah proses yang dilaksanakan bersama oleh pemerintah, dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

Sedangkan bagi A. H. J. Helming PEL didefinisikan sebagai proses terjalinnya kemitraan antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Helming menyatakan bahwa PEL menekankan kontrol lokal dan penggunaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan fisik yang tersedia.¹⁴

Di sisi masyarakat, pembangunan ekonomi lokal diartikan sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari segala kendala yang menghambat upaya peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan ini dapat diartikan secara khusus sebagai jaminan keselamatan untuk menjamin keselamatan adat istiadat dan keyakinannya, usaha dan martabat kemanusiaannya. Tidak semua jaminan tersebut dapat diperoleh dari luar sistem masyarakat karena tidak berkelanjutan sehingga harus dicari dalam sistem masyarakat itu sendiri, yang sering disebut dengan kemandirian. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya penguatan masyarakat ekonomi suatu daerah dengan mendukung kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai-nilai lokal, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, maupun kemampuan pengelolaan kelembagaan. (*capacity of institutions*) maupun aset pengalaman.

Pengembangan perekonomian lokal saja tidak cukup untuk meningkatkan sumber daya manusia, untuk itu juga diperlukan lembaga-lembaga yang terlatih untuk mengelola sumber daya manusia yang maju dan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan kelembagaan ekonomi

¹⁴ Dina Mariana, Sukasmanto, *Buku Panduan Pelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) untuk Perbaikan Layanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta : IRE, 2019), 25.

lokal. Pembangunan ekonomi lokal melalui pengembangan seluruh lembaga mitra *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) Hal ini memerlukan kemampuan komunikasi antar seluruh instansi terkait yang menjamin keberlangsungan kerja dan mitra usaha.¹⁵

PEL adalah proses partisipatif yang memupuk dan mendorong kemitraan pemangku kepentingan lokal dalam pengembangan perencanaan bersama dan strategi implementasi yang terutama didasarkan pada penggunaan sumber daya lokal yang kompetitif dan tujuan akhir untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. PEL juga dinilai sebagai suatu proses yang melibatkan pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat dalam merangsang kegiatan ekonomi dengan tujuan menciptakan lapangan kerja lokal melalui pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya manusia, alam, dan kelembagaan yang ada.

PEL merupakan suatu prakarsa konkrit ILO (*International Labour Organization*) yang dimulai dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan jembatan berkelanjutan antara bantuan dan pembangunan, memberikan suara kepada seluruh aktor lokal, membantu memperluas dan mengurangi kesenjangan keterwakilan, meningkatkan potensi pengembangan aset dan sumber daya lokal, khususnya operasional. sektor informal, menciptakan bentuk-bentuk kerja sama tradisional untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang terkena dampak krisis, menjaga lingkungan yang mendukung pekerjaan yang layak

¹⁵ Muhammad Hasan, dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, (CV: Nur Lina: 2018), 195

sehubungan dengan hak-hak pekerja dan jaminan sosial, dan menjaga keharmonisan pembangunan ekonomi. dengan kelestarian lingkungan hidup.

Pendekatan PEL memberikan kerangka komprehensif untuk inisiatif dan kegiatan yang menanggapi kebutuhan untuk mengintegrasikan dimensi pembangunan ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan di tingkat regional. Oleh karena itu, PEL merupakan sebuah proses yang, selain faktor lingkungan sosial dan kelembagaan, juga menawarkan solusi berbeda berdasarkan lokasi, budaya, potensi ekonomi, dan situasi politik.¹⁶ Dalam PEL, prinsip inklusi sosial menjadi penting, diinisiasi dan dilaksanakan untuk membuka peluang partisipasi masyarakat desa, termasuk kelompok marginal, mulai dari proses perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok marginal yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang tersedia sehingga berujung pada kemiskinan.

Setidaknya ada empat kata kunci di PEL. Secara khusus, kegiatan PEL dilaksanakan secara partisipatif, sehingga membawa para pihak ke dalam hubungan yang setara. Kedua, ada aktor, dimana para Aktor berhubungan satu sama lain dan mengambil peran mereka. Pelaku dapat terdiri dari pengusaha lokal, kelompok usahanya, pemerintah desa atau sektor swasta. Ketiga, adanya sumber daya atau potensi lokal yang dikelola untuk kegiatan perekonomian, produksi baik barang maupun jasa. Keempat,

¹⁶ Martin Gasser Carmela, Salzano Roberto Di Meglio, Alfredo Lazarte-Hoyle, *Pembangunan Ekonomi Lokal Dalam Situasi Pasca Krisis*, (Kantor Perburuhan Internasional, 2005), 29.

bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat berkeadilan.¹⁷

2. Manfaat Pengembangan Ekonomi Lokal

PEL mempunyai beberapa manfaat seperti yang di tulis Dina Mariana, Sukasmanto, tentang Buku Panduan Pelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan penting PEL adalah meningkatkan produksi dan mendiversifikasi produk lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya kapasitas produksi suatu wilayah dari waktu ke waktu yang mencerminkan pertumbuhan pendapatan masyarakat.
- b. Kesetaraan dan keadilan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di kawasan kemudian harus dinikmati secara merata dan adil, terutama bagi kelompok marginal dan rentan. Konsep PEL memerlukan peran pemerintah daerah dalam pemerataan pengelolaan sumber daya lokal melalui kebijakan positif terhadap kelompok rentan dan marginal..
- c. Pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Peningkatan kapasitas produksi pada Desain LED berdampak pada pertumbuhan pendapatan masyarakat (termasuk kelompok marginal). Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, terutama mereka yang berpendapatan rendah.¹⁸

¹⁷ Dina Mariana, Sukasmanto, *Buku Panduan Pelembagaan...*, 27.

¹⁸ Dina Mariana, Sukasmanto, *Buku Panduan Pelembagaan...*,33.

- d. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. PEL mempunyai tujuan penting dalam mengelola sumber daya lokal bukan sebagai bagian dari eksploitasi, namun sebagai sumber mata pencaharian yang berkelanjutan. Artinya, aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk prinsip ekologi dan kehidupan berkelanjutan, harus dipertimbangkan ketika menggunakan sumber daya yang tersedia (*sustainable livelihood*) menjadi syarat mutlak dalam PEL.
- e. Pemberdayaan masyarakat. PEL sebenarnya memiliki semangat pemberdayaan dimana perancangan PEL didasarkan pada kemampuan pengelolaan sumber daya lokal.¹⁹

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah Saw. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, partisipasi, etos kerja, dan tolong-menolong di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleransi yang hakiki tadi sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah Saw. Sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong-menolong (*ta'awun*) bagi semua warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dengan adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain.²⁰ Hal ini menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam yang jika diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas, akan

¹⁹ Dina Mariana, Sukasmanto, *Buku Panduan Pelembagaan...*,33.

²⁰ Adib Susilo, *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2 Agustus 2016, 201-202

menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia.²¹ Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid (57): 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka nenpergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan Rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa).*

Tujuan jangka panjang pelaksanaan PEL adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal di suatu wilayah atau wilayah secara terus menerus dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, PEL mempunyai tujuan yaitu:

- a. mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan nilai tambah
- b. Menciptakan dan pemerataan kesempatan kerja
- c. Meningkatkan daya saing ekonomi dibandingkan wilayah atau negara lain
- d. Kemitraan, yaitu terciptanya dan berkembangnya kerjasama positif antar daerah.²²

²¹ Ibid.

²² Hania Rahma, *Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Kota dan Kabupaten*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2012), 18.

3. Prinsip Pengembangan Ekonomi Lokal

Tujuan PEL bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, namun lebih dari itu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan dan marginal yang sudah lama membutuhkan pemberdayaan politik. Untuk menerapkan PEL inklusif, perlu memperhatikan beberapa prinsip saat memeriksanya:

- a. Inklusif: mempertimbangkan kepentingan kelompok marginal dan mengembangkan prosedur yang tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kelompok tersebut mempunyai hak untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya yang ada di tingkat lokal.
- b. Demokratis: Pengelolaan harus demokratis dan mampu mendorong partisipasi semua kalangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program yang sedang berjalan. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengkomunikasikan pemikirannya mengenai perubahan. Selain itu, pemerintah kota mempunyai peran dalam mendorong dan menciptakan suasana politik yang partisipatif.
- c. Kolektivitas: LED dipimpin oleh aktor-aktor yang mempunyai peran berbeda dan saling bersinergi sehingga tercipta kolektivitas (kebersamaan).
- d. Tanggung jawab sosial: tanggung jawab kepada masyarakat atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang tersedia di tingkat lokal.

Publik yang bersangkutan lebih luas dari masyarakat untuk membangkitkan kepercayaan publik.

- e. Pembangunan berkelanjutan: PEL berorientasi pada peningkatan keberlanjutan kegiatan produksi dan ekologi, dimana PEL dikembangkan dari kegiatan ekonomi yang legal dengan memperhatikan aspek sosial budaya.²³

Prinsip -yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan pendekatan PEL adalah sebagai berikut::

- a. Partisipasi dan dialog sosial: Partisipasi aktor lokal dalam proses pembangunan di wilayahnya merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penggunaan mekanisme partisipatif mengurangi risiko konflik dan menciptakan kohesi sosial. Menyatukan para pemangku kepentingan melalui forum lokal membantu membangun kepercayaan, mendorong inovasi dan meningkatkan penciptaan jaringan dan kegiatan sosial. Perencanaan dan penerapan strategi bottom-up terus dilakukan untuk memastikan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal dan menjadi jaminan bagi kelanjutan proses pembangunan.
- b. Kemitraan antara sektor publik dan swasta: investasi tambahan yang ditargetkan setepat mungkin akan membawa manfaat sosial ekonomi yang besar. PEL adalah cara untuk menyediakan sumber daya lokal, mendorong alokasi yang efisien. Oleh karena itu, kemitraan antara sektor swasta, pemerintah, dan nirlaba sangatlah penting dalam proses pembangunan berkelanjutan, yang memungkinkan harmonisasi

²³ Dina Mariana, Sukasmanto, *Buku Panduan kelembagaan ...*, 31.

perencanaan investasi oleh berbagai aktor lokal. Koordinasi kerja sama dan kegiatan pembangunan mencegah pendekatan “satu ukuran untuk semua” yang tidak efisien dan mendukung legitimasi dan keberlanjutan proses pembangunan.

- c. Kawasan: kedekatan geografis dan budaya mendukung kondisi ideal untuk pertumbuhan, inovasi dan pembangunan. Pertama, masyarakat yang bertetangga di wilayah yang sama mengetahui kebutuhan dan sumber daya mereka dengan lebih baik. Kedua, daerah-daerah cenderung memiliki kesamaan kepentingan dan kedekatan budaya. Ketiga, kawasan memungkinkan terjadinya interaksi sosial, ekonomi, dan politik antar aktor kawasan, yang mengarah pada kohesi sosial dan kepercayaan. Kesimpulannya, daerah merupakan platform yang ideal untuk menciptakan suara daerah yang kuat bagi seluruh pemangku kepentingan. Berbeda dengan pendekatan pengembangan masyarakat tradisional, PEL memberikan peluang dan struktur untuk mewakili suara daerah melalui kerja sama dengan mitranya di tingkat nasional dan internasional.²⁴

C. *One Village One Product* (OVOP)

1. Latar Belakang *One Village One Product* (OVOP)

Strategi *One Village One Product* yang selanjutnya disebut dengan kata OVOP pertama kali dikenalkan oleh Morihiko Hiramatsu, seorang mantan pejabat MITI yang terpilih menjadi Gubernur Oita pada tahun 1979. Dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat diterapkan konsep pembangunan daerah berdasarkan potensi daerah yang melibatkan seluruh

²⁴ Martin Gasser Carmela Salzano Roberto di Meglio Alfredo Lazarte-Hoyle, *Pembangunan Ekonomi Lokal*, 30.

elemen masyarakat. OVOP merupakan strategi untuk mengembangkan potensi daerah pada suatu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun global. Produk yang dihasilkan mempunyai ciri khas dan keunikan daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal baik alam maupun manusia. Selain itu, OVOP merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden No VI Tahun 2007, tentang percepatan sektor riil dan pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 8 Juni 2007 yang mengamanatkan pengembangan sentra melalui pendekatan OVOP.²⁵

Pendekatan OVOP merupakan gerakan berbasis masyarakat yang mengembangkan potensi daerah secara terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap diri dan kemampuan daerah. Sebagai pendekatan pembangunan dari dalam (*endogenous development*) yang memaksimalkan potensi daerah sebagai modal inti dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sehingga masyarakat di wilayah tersebut dapat mengembangkan kearifan lokal. (*local wisdom*) setempat dan dengan mendorong berkembangnya “*semi-secondary industry*”. Hal ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat mengolah dan menghasilkan nilai tambah terhadap produk primer yang dihasilkannya. Pemahaman

²⁵ Juhari, Strategi Pengembangan Produk Unggulan Yang Berbasis OVOP (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol 5, No. 1,(Edisi Juli 2019), 84.

seperti ini diharapkan dapat memperkuat kekuatan perekonomian Indonesia yang sebagian besar tersembunyi di pedesaan.²⁶

Di Indonesia, Kementerian Perindustrian meluncurkan pendekatan OVOP pada tahun 2006, yang diikuti dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Penguatan UKM, serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M-Ind/Per/9/2007 tentang penguatan efisiensi pengembangan UKM melalui pendekatan terpadu *One Village One Product* (OVOP) untuk mendorong produk lokal industri kecil dan menengah bersaing di pasar global (Kementerian Perindustrian, 2011).

Dalam pendekatan OVOP di Indonesia, masalah utama yang terlihat di lapangan selama penerapannya adalah hubungan yang tidak harmonis antara lembaga-lembaga terkait. Kemungkinan besar, situasi ini akan muncul pada tahun pertama implementasi. Pengalaman menunjukkan bahwa badan/lembaga di Indonesia mempunyai ego sektoral yang tinggi, sehingga menyebabkan buruknya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pembangunan, dan sistem keuangan yang ada saat ini menghambat pembangunan itu sendiri. Sistem pembiayaan pembangunan yang ada saat ini, baik bersumber dari APBN maupun APBD, diyakini membatasi ruang lingkup pendekatan OVOP dalam industri pertanian.

Permasalahan serupa juga dialami oleh penyelenggara OVOP Thailand pada awal diperkenalkannya. Namun berkat koordinasi pembangunan yang kuat dari pemerintah pusat dan penyelesaian masalah

²⁶ Sahat M. Pasaribu, Pengembangan Agro-Industri Pedesaan Dengan Pendekatan *One Village One Product* (OVOP), *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 29 No. 1, (Juli 2011),2.

yang cepat (*immediate resolution*),,, dampak negatif yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memperkuat sistem organisasi melalui pengelolaan dan pengawasan yang sederhana dan ketat. Kondisi ini menjadikan organisasi OTOP Thailand sangat fleksibel baik secara teknis maupun dari segi finansial/sistem pendanaan. Dari keberhasilan implementasi program OTOP Thailand untuk membangun daerahnya, kita bisa belajar solusi cepat dan penyelesaian masalah secara menyeluruh dengan dukungan institusi yang kuat.²⁷

2. Prinsip *One Village One Product* (OVOP)

Tiga prinsip utama pendekatan OVOP harus dipahami dan diterima. Ketiga prinsip dasar tersebut adalah pemilihan produk manufaktur, pengukuran kekuatan diri dan penggunaan sumber daya yang ada, seperti diuraikan di bawah ini:

a. Produksi lokal di pasar global (*Local at Global*)

Upaya pemanfaatan potensi sumber daya lokal untuk menghasilkan produk tertentu yang dapat mencapai ketenaran global. Setiap daerah menghidupkan kembali potensi sumber dayanya dan mendorong produksi produk-produk istimewa atau unik yang memadukan potensi, kearifan lokal, dan budaya yang bernilai tambah tinggi sesuai standar pasar internasional, dengan tetap menjaga

²⁷ Sahat M. Pasaribu, Pengembangan Agro-Industri Perdesaan ..., 2.

kelestarian lingkungan. Produk OVOP mungkin dipasarkan secara internasional, namun tetap populer di pasar lokal.

b. Kemandirian dan Kreativitas.

Membangun kekuatan komunitas gerakan OVOP sendiri. Usaha ini dilakukan secara mandiri dengan kreativitas, inovasi, tekad dan sumber daya yang dimiliki serta pengetahuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat menentukan produk mana yang akan dikembangkan karena mempunyai ciri/keunikan lokal. Pemerintah memberikan dukungan, fasilitasi dan kemudahan terhadap potensi yang ada, termasuk advokasi teknis, mediasi, nasihat teknis mengenai praktik produksi yang baik, pengembangan produk agar lebih menarik, penerapan teknologi dan metode baru, standardisasi dan informasi investasi, serta akses terhadap pemasaran.

c. Berorientasi pada SDM

Pengembangan SDM dilakukan sedemikian rupa sehingga mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengubah tantangan menjadi peluang di berbagai bidang dan sektor (pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan sektor-sektor lain yang memungkinkan di daerah). Sumber daya manusia yang mapan pantang menyerah untuk mencari dan mengeksplorasi inovasi-inovasi baru dan dengan tekadnya pantang menyerah karena kegagalan dan dengan tekadnya selalu siap menghadapi tantangan. Dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pendekatan OVOP merupakan suatu metode pembangunan daerah terpadu yang melalui gerakan bersama menghasilkan produk kelas dunia yang

unik/khas daerah serta memanfaatkan kearifan lokal dan ketersediaan sumber daya yang ada. Satu desa tersebut di atas dapat diperluas hingga mencakup wilayah administratif lain seperti kecamatan, kabupaten/kota atau satuan wilayah lainnya tergantung potensi usaha dan skala ekonomi. Tujuan pemberian nama wilayah administratif adalah untuk membedakan letak dan tanggung jawab masing-masing lembaga negara.²⁸

Dengan adanya sumber daya manusia diharapkan oleh Allah untuk menjadi pemakmur bumi dalam pemanfaatan tanah dan alam. Allah berfirman dalam surat Al-Hud ayat 61.

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya : “dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.”²⁹

Dalam tafsir ayat ekonomi dijelaskan bahwasanya penafsiran ayat di atas menjelaskan bahwa Allah pula yang menjadikan manusia sebagai pengelola dan pemakmur bumi dengan melakukan berbagai aktifitas.³⁰

Dalam tafsir Ibnu Katsier dijelaskan bahwa Allah berfirman,” kami telah mengutus kepada kaum Tsamud seorang Rasul, ialah saudara mereka sendiri yang shaleh, yang berseru kepada mereka untuk menyembah kepada Allah yang telah menciptakan mereka dari tanah (bumi) dan menjadikan mereka berkuasa di atasnya, mengelolanya untuk

²⁸ Sahat M. Pasaribu, Pengembangan Agro-Industri Perdesaan..., 5.

²⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-quran, vol. 1, hlm. 35

³⁰ Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, Dan Tafsir, hlm. 43.

kepentingan hidup dan kemakmuran mereka. Karenanya, sebagai imbalan, shaleh berkata kepada mereka, Beristighfarlah (mohon ampun) kamu dari dosa-dosa kamu yang lalu, kemudia bertaubatlah dari dosa yang akan datang. Sesungguhnya Tuhanku adalah dekat yang mendengar doa-doa hamba-hambanya serta memperkenankannya.³¹

Manusia dengan kemampuan berpikirnya mampu merumuskan kerja-kerja peradaban buat kesejahteraan manusia. Berbeda dengan materi alam lainnya, seperti gunung, bukit, bahkan bumi ini. Secara fisik mereka lebih besar, namun tidak memiliki kebebasan. Karenanya mereka tidak dapat menjadi khalifah di alam ini. Allah swt berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*Artinya : “Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung dan bukit-bukit, namun mereka menolak untuk memikulnya karena merasa berat. Dan manusia memikulnya. Sungguh manusia itu zalim dan bodoh”.*³²

Dalam kaitan ini, tujuan pembangunan pedesaan berbasis OVOP secara garis besar dapat didefinisikan paling sedikit sebagai berikut: (a) menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat local, (b) memperkuat kemandirian Masyarakat dalam bidang pembangunan perekonomian daerah, (c) pengembangan kearifan local tentang pengetahuan tradisional sebagai potensi sumber daya lokal yang

³¹ Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier, vol.4. trj. Salim bahreisy, said bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988), hlm. 308.

³² Kemenag RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya, 427.

diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi nilai sumber daya manusia local, (d) pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat pada aspek tertentu, (e) pengembangan motivasi, kreativitas dan inovasi masyarakat melalui produk-produk unik yang bercirikan local, dan (f) mengembangkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan taraf hidup pada berbagai tingkat perekonomian.³³

3. Konsep Dasar One Village One Product (OVOP)

Melihat keberhasilan Thailand dan Jepang, penerapan konsep OVOP di Indonesia diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan yang tiada habisnya, masyarakat memiliki sumber daya untuk mengoptimalkan produk lokal dan dapat mandiri. Unit usaha yang dikelola sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Pemberdayaan masyarakat didasarkan pada pendekatan OPOP-OVOP-OVOC, dengan fokus utama pada revitalisasi. Kebangkitan merupakan upaya untuk menghidupkan kembali sesuatu yang pernah hidup dan bergairah namun mengalami kemunduran atau pembusukan dalam kurun waktu tertentu. Rumusan untuk menghidupkan kembali konsep dasar OVOP adalah sebagai berikut:

- a. Revitalisasi desa yang merupakan pemanfaatan segala peluang dan peluang yang ada di desa untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, yang dapat dicapai melalui program pemberdayaan.

³³ Sahat M. Pasaribu, Pengembangan Agro-Industri Perdesaan..., 6.

- b. Revitalisasi manusia yaitu pemanfaatan dan peningkatan ketrampilan, kesanggupan dan kesanggupan seseorang agar lebih produktif dalam kegiatan ekonomi. Revitalisasi manusia merupakan upaya untuk mengembangkan manusia (human capital).
- c. Revitalisasi Perdagangan yang merupakan Kebangkitan dunia usaha merupakan upaya untuk menciptakan sistem perekonomian di desa yang mampu memenuhi kebutuhannya.³⁴

4. Tujuan OVOP

OVOP berupaya mengembangkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap mengedepankan nilai tambah lokal dan mendorong semangat membangun komunitas. Selain itu, OVOP bertujuan untuk meneliti dan mempromosikan produk-produk inovatif dan kreatif dari sumber daya alam lokal yang khas daerah, bernilai tambah tinggi, menjaga kelestarian lingkungan, reputasi tinggi, dan berdaya saing.³⁵ OVOP merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah produk-produk terbaik daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang koperasi atau UKM. Tujuan dari pengembangan OVOP adalah:

- 1) Mengembangkan bahan baku daerah terbaik yang mempunyai potensi pemasaran lokal dan internasional

³⁴ Firman Ardiansyah, Optimalisasi BUMDES Berbasis OVOP (One Village One Product) Concept Di Kabupaten Pamekasan, *IMKA Implementasi Manajemen & Kewirausahaan* Vol. 1, No. 2 (Oktober 2021), 159.

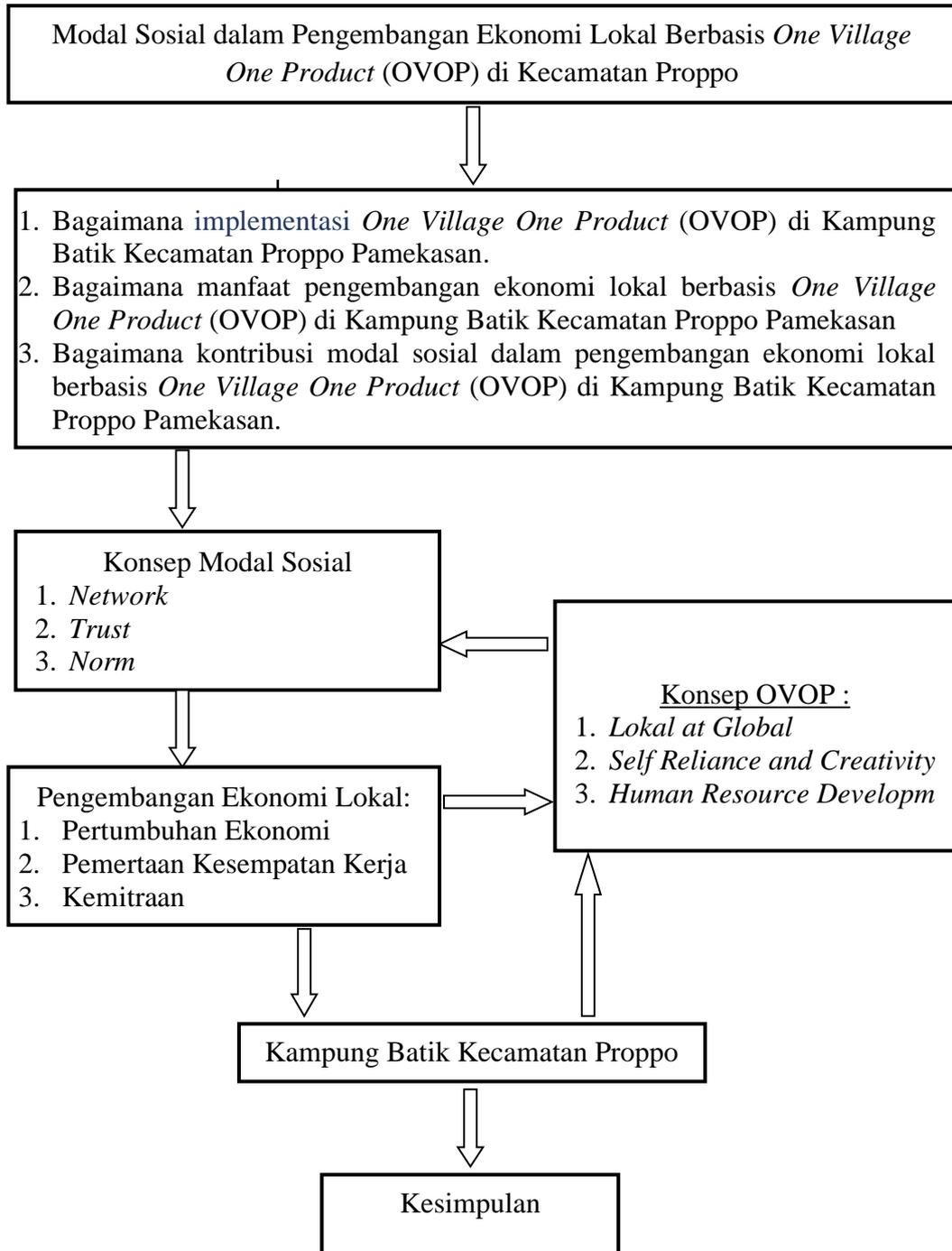
³⁵ Juhari, Strategi Pengembangan Produk Unggulan Yang Berbasis Ovop (Studi Kasus Pada Umkm Di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol 5, No. 1,(Edisi Juli 2019), 86.

- 2) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk dan nilai tambah agar mampu bersaing dengan produk yang berasal dari luar negeri (impor).
- 3) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.³⁶

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan jalannya penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih optimal. Berdasarkan teori penelitian yang dikemukakan, maka kerangka konseptual penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

³⁶ Dewa Bagus Sanjaya, Ekonomi Kreatif Warga Belajar Perempuan Berbasis Potensi Lokal Dengan Pendekatan Ovop (One Village One Product) Di Desa Tigawasa Buleleng, Bali, *NGAYAH*, Volume 8, Nomor 2, (Desember 2017), 229.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual